



JPEKBM

JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI, KEWIRAUSAHAAN,
BISNIS DAN MANAJEMEN

Volume 3
No. 1, 2019
page 035-043

Article History:

Submitted:
20-03-2019
Accepted:
15-05-2019
Published:
31-05-2019

**ANALYSIS OF THE IMPACT OF MINIMUM WAGE AND FOREIGN
DIRECT INVESTMENT ON ECONOMIC GROWTH IN INDONESIA'S
PROVINCES**

**ANALISIS DAMPAK UPAH MINIMUM DAN INVESTASI ASING
LANGSUNG TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI DI
INDONESIA**

Moh. Faizin

IAIN PONOROGO

Email: faizin296@gmail.com

URL: <https://doi.org/10.32682/jpekbm.v3i1.1339>

DOI: 10.32682/jpekbm.v3i1.1339

Abstract

One of the measures of economic development of a country is the country's economic growth. The instrument in measuring the economic growth is by measuring the Gross Domestic Product (GDP). Determination of the amount of wages by local governments will have an impact on the absence of low wages for workers. An increase in the value of wages also has an impact on increasing the amount of public income in general, meaning that on a wider scale an increase in income also means an increase in economic growth for the region. Part of the initial step in enhancing economic growth is investment both domestic and foreign. Indonesia as a developing country is still considered very necessary in the provision of capital for development purposes. This study uses panel data from 33 provinces in Indonesia. Using regression with the Random Effect Model. The data used in this study are provincial minimum wage data, foreign direct investment and economic growth data. The results of this study are the provincial minimum wage has a negative impact on economic growth and foreign direct investment has a positive impact on economic growth. Simultaneously the minimum wage and foreign direct investment have no impact on economic growth.

Keyword: *Minimum wages, investment, economic growth.*



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author and STKIP PGRI Jombang

Abstrak

Salah satu dari alat ukur perkembangan ekonomi dari suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Instrument dalam mengukur pertumbuhan ekonomi tersebut adalah dengan mengukur Produk Domestik Bruto (PDB). Penentuan besaran upah oleh pemerintah daerah akan berdampak pada tidak adanya lagi upah yang rendah bagi para pekerja. Peningkatan nilai upah juga berdampak pada naiknya jumlah pendapatan masyarakat secara umum, artinya dalam skala lebih luas peningkatan pendapatan juga berarti peningkatan pertumbuhan ekonomi bagi daerah tersebut. Bagian dari langkah awal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan penanaman modal baik domestik maupun asing. Indonesia sebagai Negara berkembang dianggap masih sangat perlu dalam penyediaan modal untuk keperluan pembangunan. Penelitian ini menggunakan data panel dari 33 provinsi di Indonesia. Menggunakan regresi dengan *Random Effect Model*. data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data upah minimum provinsi, investasi asing langsung dan data pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini adalah upah minimum provinsi berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi asing langsung berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara simultan upah minimum dan investasi asing langsung tidak berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci: *Upah minimum, investasi, pertumbuhan ekonomi*

Pendahuluan

Salah satu dari alat ukur perkembangan ekonomi dari suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Instrument dalam mengukur pertumbuhan ekonomi tersebut adalah dengan mengukur Produk Domestik Bruto (PDB). PDB sendiri merupakan gambaran utuh dari nilai barang dan jasa yang telah dihasilkan oleh suatu negara dalam periode waktu tertentu (Sukirno, 2006). Semakin tinggi PDB suatu negara berarti semakin bagus kinerja ekonomi di negara tersebut, dengan kata lain PDB merupakan cerminan dari kinerja perekonomian. Dalam pertumbuhan ekonomi yang baik, maka produksi akan barang dan jasa juga bertambah. Ketika terjadi peningkatan pendapatan di suatu negara investasi di negara tersebut pun otomatis bertambah. Artinya tingkat pendapatan nasional yang tinggi akan mempengaruhi pendapatan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan jumlah kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) walaupun dalam hal ini dengan mengesampingkan kenaikan PDB itu lebih kecil atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan penduduk. Komponen

utama yang merupakan faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi setiap negara menurut terdiri dari tiga hal, pertama akumulasi modal yang merupakan semua bentuk investasi baru pada tanah, kedua peralatan fisik dan sumber daya manusia dan yang ketiga merupakan pertumbuhan penduduk.

Adanya desentralisasi fiskal yang diterapkan di Indonesia menjadikan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini meneliti Produk Domestik Bruto untuk skala provinsi, sehingga angka pertumbuhan yang diambil adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Adanya kewenangan masing daerah dalam menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) tiap tahunnya, diharapkan mampu memberikan dampak yang positif terhadap distribusi pendapatan di masyarakat. Penetapan UMP juga diharapkan mampu mengurangi ketimpangan masing-masing daerah. Dengan besaran UMP yang menjadi kebijakn masing-masing provinsi diharapkan akan mampu dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Sehingga migrasi ke daerah atau ke kota besar menjadi berkurang, sehingga pada akhirnya mampu menggerakkan perputaran perekonomian daerah yang bermuara pada naiknya pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Lahirnya undang-undang No 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah menimbulkan adanya perubahan pada kebijakan dalam pengelolaan keuangan yang ada di masing-masing daerah. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan sekaligus kewajiban dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dampak dari dari pelaksanaan desentralisasi fiskal diantaranya adanya kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan fiskal di daerah, tetapi pada sisi yang lain juga memunculkan persoalan yang baru pula, masalah tersebut diantaranya adalah kesenjangan dari sisi pertumbuhan ekonomi antar daerah. Hal ini dikarenakan tingkat kesiapan pengelolaan fiskal dari masing-masing daerah yang berbeda-beda (Apriana & Suryanto, 2016).

Kewenangan dalam mengatur dan mengelola fiskal di daerah tidak hanya terkait pengelolaan kondisi makro ekonomi di daerah tersebut, tetapi juga lebih luas lagi kebijakan dalam penentuan besaran upah tenaga kerja juga menjadi domain kebijakan pemerintah daerah. Upah bagi pengusaha dipandang sebagai beban biaya yang berujung pada pengurangan keuntungan usaha. Artinya keputusan pemerintah daerah dalam penetapan upah akan mengganggu biaya modal (Simanjuntak, 1998). Pada saat yang sama penentuan besaran upah oleh pemerintah daerah akan berdampak pada tidak adanya lagi upah yang rendah bagi para pekerja. Peningkatan nilai upah juga berdampak pada naiknya jumlah pendapatan masyarakat secara umum, artinya dalam skala lebih luas

peningkatan pendapatan juga berarti peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bagi daerah tersebut. Pendapat yang serupa juga disampaikan oleh Cahuc dan Michel yang mengatakan bahwa kebijakan atas penentuan upah minimum berdampak positif terhadap pertumbuhan (Cahuc & Michel, 1996). Dalam penjelasan yang serupa, penetapan upah minimum mempercepat pertumbuhan dalam jangka panjang secara proporsional dengan ekspor (Askenazy, 2003).

Bagian dari langkah awal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan penanaman modal baik domestik maupun asing. Investasi terdiri dari investasi langsung (*direct investment*) dan investasi tidak langsung (*portofolio investmen*). Cakupan investasi tersebut walaupun mempunyai pengertian pokok yang sama yakni penanaman modal tetapi dua hal tersebut mempunyai perbedaan yang mendasar. Investasi langsung dilakukan dengan mendirikan langsung perusahaan dan investasi tidak langsung hanya melalui pembelian saham dalam jumlah tertentu melalui pasar modal. Kegiatan dalam investasi langsung mengandung arti bahwa investor terlibat langsung dalam mendirikan atau menjalankan usahanya.

Indonesia sebagai Negara berkembang dianggap masih sangat perlu dalam penyediaan modal untuk keperluan pembangunan. Untuk mendapatkan modal yang cukup, Indonesia tidak bisa hanya sekedar mengandalkan pinjaman dari luar negeri. Keadaan tersebut merupakan faktor pendorong dalam upaya mencari alternatif berupa penanaman modal khususnya dari luar negeri. Kecukupan modal akan berdampak kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara umum (Septifany, 2015). Pendapat yang senada juga diungkapkan (Nangarumba, 2015), penelitian yang dilakukan lamsiraroj yang menemukan bahwa dari 140 negara data menunjukkan bahwa investasi asing langsung berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut (lamsiraroj & Ulubaşođlu, 2015) hasil yang sama juga ditemukan oleh Nistor, bahwa di negara Rumania investasi asing langsung juga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Nistor, 2014). Begitu pula penelitian di negara-negara eropa (Pegkas, 2015), bahwa adanya investasi juga akan mampu mempengaruhi produktivitas dan jumlah angkatan kerja berbagai sektor pekerjaan di masyarakat. Meningkatnya produktivitas pada akhirnya juga akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi secara umum. Hasil penelitian yang dilakukan Ruth dan Syofyan menunjukkan bahwa aliran dana investasi asing langsung di negara-negara Asean (Indonesia, Thailand, Singapura, Vietnam dan Malaysia) secara signifikan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi (Ruth & Syofyan, 2014).

Perbedaan pendapat bahwa investasi asing langsung dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi ataupun malah sebaliknya, justru bukanlah sesuatu hal yang baru. Investasi asing dipercaya mampu berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi akibat adanya transfer teknologi, keahlian manajerial serta adanya akses jaringan internasional (Effendi & Soemantri, 2003). Pendapat yang berbeda mengatakan bahwa investasi asing langsung hanya memiliki dampak yang rendah di negara-negara pasifik terhadap tumbuhnya perekonomian dalam suatu negara tersebut (Feeny, Iamsiraroj, & McGillivray, 2014).

Dalam meningkatkan penanaman modal asing diperlukan sebuah iklim investasi yang memadai, hal ini bertujuan untuk memberikan keyakinan para investor untuk berinvestasi di Indonesia (Tulong, 2015). Penyederhanaan dalam masalah perijinan penanaman modal termasuk diantaranya. Mengingat investor yang cenderung menginginkan proses pelayanan perijinan yang efisien, mudah dan cepat. Keadaan dari makro ekonomi juga merupakan bagian dari kondisi iklim perekonomian yang juga tidak dapat dilepaskan. Diantara kondisi makro ekonomi antara lain berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, kegiatan ekonomi, pengangguran, inflasi, neraca pembayaran dan neraca perdagangan (Sukirno, 2006).

Wilayah Indonesia terdiri dari berbagai provinsi. Kesiapan daerah dalam pengelolaan fiskal tentu berpengaruh bagi kelangsungan penanaman modal asing langsung dan upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini menjelaskan adanya dampak hubungan investasi asing luar negeri dan upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan penelitian penjelasan (*Explanatory Reseach*) dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Sementara metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel di 33 provinsi di Indonesia sejak tahun 2012 s/d 2017 dengan menggunakan aplikasi Eviews 9. Variabel penelitian ini terdiri dari Upah minimum provinsi, investasi asing langsung (FDI), dan pertumbuhan ekonomi regional masing-masing provinsi.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan *Random Effect Model*. Hal ini dik karenakan dalam uji chow dan uji Hausmen dengan menggunakan aplikasi Eviews 9

didapatkan bahwa *Random Effect Model* lebih tepat dari pada *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model*.

Tabel 1. Hasil Uji Chow dengan menggunakan aplikasi Eviews 9

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.624106	(32,163)	0.0000
Cross-section Chi-square	127.898239	32	0.0000

Dari Tabel 1, dapat diketahui nilai probabilitas pada Cross-Section F menunjukkan angka 0.0000 atau di bawah 0.05. hal ini menunjukkan bahwa penggunaan *Fixed Effect Model* lebih baik bila dibandingkan dengan penggunaan *Common Effect Model*. Selanjutnya perbandingan penggunaan model *Fixed Effect Model* dengan *Random Effect Model* dengan menggunakan Uji Hausman.

Tabel 2. Hasil Uji Hausman dengan menggunakan aplikasi Eviews 9

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.167696	2	0.5577

Dari Tabel 2, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas cross-section random adalah sebesar 0.5577 lebih besar dari 0.05. hal ini menunjukkan bahwa perbandingan penggunaan *Fixed Effect Model* dengan *Random Effect Model* didapatkan bahwa *Random Effect Model* lebih baik dari pada *Fixed Effect Model*.

Hasil penghitungan dengan menggunakan *Random Effect Model* selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Random Effect Model dengan menggunakan Eviews 9

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14.87740	6.496107	2.290202	0.0231
UMP	-0.767796	0.456927	-1.680348	0.0945
INV	6.22E-05	0.000190	0.328389	0.7430
R-squared	0.014462	Mean dependent var		1.802874
Adjusted R-squared	0.004354	S.D. dependent var		1.864530
S.E. of regression	1.860466	Sum squared resid		674.9601
F-statistic	1.430763	Durbin-Watson stat		1.818067
Prob(F-statistic)	0.241625			

Hasil penghitungan dengan menggunakan aplikasi Eviews pada Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel UMP dan memberikan pengaruh negatif sebesar -1.680348 dan variabel INV memberikan pengaruh positif sebesar 0.328389 pada pertumbuhan ekonomi di tiap provinsi di Indonesia. Hasil penghitungan ini tidak signifikan karena nilai dari probabilitas masing-masing variabel lebih dari 0.05. Hasil uji simultan (F-statistic) juga menunjukkan bahwa secara simultan kedua variabel berpengaruh sebesar 1.430763, tetapi penghitungan ini juga tidak signifikan dikarenakan nilai Prob (F-statistic) 0.241625 atau lebih dari 0.05.

Hasil penghitungan ini menunjukkan bahwa upah minimum provinsi serta penanaman modal asing atau dalam istilah lain investasi asing langsung bukan sebuah instrument yang mampu memberikan dorongan yang kuat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis dan teori sebelumnya yang menganggap bahwa upah dan investasi berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Walaupun dalam penghitungan menunjukkan bahwa variabel investasi berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya variabel upah minimum berpengaruh negatif.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian (Cahuc & Michel, 1996) serta penelitian (Askenazy, 2003) yang menyatakan bahwa kebijakan upah minimum berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara positif. Dari sisi variabel investasi asing langsung juga demikian, hasil penelitian ini walaupun variabel investasi asing langsung berdampak positif seperti pada penelitian (Septifany, 2015), (Nangarumba, 2015), (Iamsiraroj & Ulubaşođlu, 2015), (Nistor, 2014), (Pegkas, 2015) dan penelitian yang dilakukan (Ruth & Syofyan, 2014), tetapi hasil penghitungan pada penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Ketidak signifikan hasil penelitian ini Disisi yang lain bisa jadi disebabkan karena nilai pertumbuhan ekonomi pada dua provinsi pada tahun 2015. Kedua provinsi tersebut yakni provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah. Dimana pada tahun 2015 yang berada jauh di bandingkan dengan provinsi yang lain di Indonesia serta pada tahun sebelum dan sesudah tahun 2015. Gejala kenaikan pertumbuhan ekonomi yang diatas rata-rata provinsi yang lain disinyalir akibat naiknya pertumbuhan pada sektor pertambangan yang signifikan.

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa variabel upah minimum provinsi memberikan pengaruh secara negatif terhadap pertumbuhan ekonomi

masing-masing daerah. Sementara variabel investasi asing langsung memberikan pengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Secara simultan kedua variabel memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penghitungan penelitian ini tidak signifikan akibat nilai dari probabilitas yang lebih besar dari 0.05. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah dengan menambahkan rentan waktu penelitian. Disisi yang lain ketidak signifikan hasil penelitian ini bisa jadi disebabkan karena adanya nilai pertumbuhan ekonomi pada provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah pada tahun 2015 yang berada jauh di dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain serta pada tahun sebelum dan sesudah tahun 2015. Gejala kenaikan pertumbuhan ekonomi yang diatas rata-rata provinsi yang lain disinyalir akibat naiknya pertumbuhan pada sektor pertambangan yang signifikan.

Referensi

- Apriana, D., & Suryanto, R. (2016). *Analisis Hubungan Antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. *Journal of Accounting and Investment*, 11(1), 68–79.
- Askenazy, P. (2003). *Minimum wage, exports and growth*. *European Economic Review*, 47(1), 147–164.
- Cahuc, P., & Michel, P. (1996). *Minimum wage unemployment and growth*. *European Economic Review*, 40(7), 1463–1482.
- Effendi, N., & Soemantri, F. M. (2003). *Foreign direct investment and regional economic growth in Indonesia: A panel data study*. *The 6TH IRSA INTERNATIONAL CONFERENCE, Regional Development in The Era of Decentralization: Growth, Poverty, and Environment, Bandung*.
- Feeny, S., Iamsiraroj, S., & McGillivray, M. (2014). *Growth and foreign direct investment in the Pacific Island countries*. *Economic Modelling*, 37, 332–339.
- Iamsiraroj, S., & Ulubaşoğlu, M. A. (2015). *Foreign direct investment and economic growth: A real relationship or wishful thinking?* *Economic Modelling*, 51, 200–213.
- Nangarumba, M. (2015). *Analisis Pengaruh Struktur Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, Belanja Modal, dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2014*. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 7(2), 9–26.
- Nistor, P. (2014). *FDI and economic growth, the case of Romania*. *Procedia Economics and Finance*, 15, 577–582.

- Pegkas, P. (2015). *The impact of FDI on economic growth in Eurozone countries. The Journal of Economic Asymmetries*, 12(2), 124–132.
- Ruth, A. M., & Syofyan, S. (2014). *Faktor Penentu Foreign Direct Investment di ASEAN-7; Analisis Data Panel, 2000-2012. Media Ekonomi Universitas Trisakti*, 95–121.
- Septifany, A. T. (2015). *Analisis Pengaruh Inflasi, Tingkat Suku Bunga, Nilai Tukar Rupiah Dan Cadangan Devisa Terhadap Penanaman Modal Asing Di Indonesia (Studi Pada Bank Indonesia Periode Tahun 2006-2014). Jurnal Administrasi Bisnis*, 25(2).
- Simanjuntak, P. J. (1998). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Edisi Kedua. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sukirno, S. (2006). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Tulong, G. A. (2015). *Analisis Pengaruh Makro Ekonomi Terhadap Keputusan Investasi Asing Di Indonesia (Studi Pada Bank Indonesia Periode 2005-2013). Jurnal Administrasi Bisnis*, 22(2).